

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: PT RazaGrafindo Persada, 2004).

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kelima. (Jakarta: Rinema Cipta, 2007).

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. (Yogyakarta: FH-UIN Press, 2004).

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-2. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

_____. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. (Yogyakarta: Arruz Media, 2010).

Hadjon, Philipus M.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Handoyo, B.Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009)

Harianto, F. Santoso. *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Kompas, 2000).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Cetakan ke-1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Pahlevi, Indra. *Pansus DPR untuk Penyelidikan Kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden Abdurrahman Wahid*. (Jakarta: DPR RI, 2001).

Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. (Bandung: Yapendo, 2006).

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2006).

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015).

Sitabuana, Tunjung Herting, “Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, (Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, 2011).

Thaib, Dahlan Thaib. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Liberty, 2000).

B. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen ke-4*.

_____. *Undang-Undang no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250)*.

_____. *Undang-Undang no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568)*.

_____. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.*

C. Jurnal

Naswar. "Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol.1 No.1 Tahun 2012.

D. Makalah / Artikel

Anonim. "Angket DPR yang Sudah Ketiga Kalinya." *Harian Kompas* , 16 Juli 2008.

Batubara, Cosmos. "Panitia Angket Harus Fokus". *Harian Kompas*, 16 Juli 2008.

Haris, Syamsuddin. "Mengembalikan Fitrah DPR", *Harian Kompas*, 12 November 2004.

Lee, Antony. "Pemberantasan Korupsi: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?", *Harian Kompas*, 26 April 2017.